

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2002, wacana otonomi daerah mendominasi isu-isu strategis seputar pendidikan, terutama untuk jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Isu-isu tersebut berangkat dari semangat desentralisasi, yang kemudian membuahkan seuntai harapan akan terwujudnya otonomi pendidikan/sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan penyempurna dari kurikulum Berbasis kompetensi (KBK). Wacana otonomi merasuk ke hampir semua ruang publik, termasuk media massa selaku cermin dari realitas masyarakat. Sejumlah stasiun televisi, dalam tiga bulan terakhir, setiap hari menayangkan iklan layanan masyarakat seputar perlunya pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diyakini sebagai wadah partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, setiap kali masalah pendidikan diangkat dalam seminar dan diskusi, maka hampir pasti permasalahan otonomi menjadi bahasan utama. Para pembicara tampil membahas otonomi sesuai perspektif kelembagaan dan profesi masing-masing.

Sebagai fasilitator di tingkat pusat, pejabat dari Depdiknas menyampaikan aspek-aspek regulasi otonomi pendidikan. Pejabat pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) mengungkap kesiapan perangkatnya menyambut desentralisasi pendidikan berikut implikasinya. Sementara para guru dan kepala sekolah membahas mengenai konsep MBS dan KBK dengan segala kendalanya.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah boleh dibilang sebagai kunci utama dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan. Secara perlahan, peranan pemerintah pusat dikurangi. Pemerintah pusat menyalurkan dana alokasi umum (DAU) ke pemerintah kabupaten/kota untuk pembayaran gaji guru. Untuk urusan pembangunan fisik sekolah dan pengadaan perangkat belajar, termasuk buku-buku pelajaran, pemerintah pusat pun masih memberikan uluran tangan lewat dana dekonsentrasi. Akan tetapi, secara bertahap, keterlibatan pemerintah pusat akan terus menciut, dengan asumsi masyarakat telah dianggap mampu mengatasi biaya-biaya semacam itu.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, desentralisasi berupa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah merupakan keniscayaan. Sisi moralnya ialah orang daerahlah yang lebih tahu permasalahan mereka sendiri. Sayangnya, harapan dan kenyataan tidak selalu berjalan beriringan.

Penafsiran yang sempit akan makna otonomi telah melahirkan jalan panjang dan berliku untuk mewujudkan desentralisasi yang hakiki. Belum apa-apa, di sejumlah daerah telah muncul tanda-tanda keinginan untuk balik haluan. Tidak sedikit guru yang seharusnya menjadi praxis pendidikan tidak mengetahui sama sekali tentang makna otonomi pendidikan, apalagi bagi para guru yang tinggal di desa-desa kecil, kurang memahami bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang perubahan kurikulum.

Desentralisasi pendidikan merupakan bagian dari kerangka otonomi daerah yang berimplikasi pada perimbangan keuangan pusat-daerah, baik dari sisi

pendapatan maupun pengeluaran. Sesuai dengan arah otonomi, sumber pembiayaan rutin dan pembangunan pendidikan harus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Akan tetapi, minimnya alokasi anggaran pendidikan di daerah merupakan salah satu bukti lemahnya keberpihakan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan urgensinya, lingkup wewenang penyelenggaraan pendidikan yang secara prioritas perlu didelegasikan ke daerah adalah pendidikan dasar dan menengah, mencakup SD, SMP/MTS, dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Hal ini penting khususnya dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun secara efisien. Pasalnya, penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun sulit dituntaskan jika hanya mengandalkan pola sentralisasi.

Atas pertimbangan itu, untuk jenjang SD-SMA, Depdiknas pada awal tahun 2002 menindaklanjuti Proopenas dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selanjutnya Keputusan Mendiknas Nomor 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Caturwulan menjadi Semester. Masih dengan acuan Proopenas, pemerintah pusat juga menghapus proyek perbukuan secara sentralistik. Anggaran perbukuan dilimpahkan ke daerah, dengan harapan memperkaya muatan lokal, di samping memberdayakan pengarang dan penerbit buku di daerah. Terakhir, Depdiknas menerbitkan satu lagi kebijakan untuk mengurangi jumlah mata pelajaran yang diujikan dalam evaluasi belajar tahap akhir nasional (ebtanas) pada jenjang SLTP

dan SLTA. Kemudian pada tahun 2003 dibentuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyempurnakan aturan-aturan tersebut (Kompas, 17 Desember 2002).

Dalam konteks ini pula, pendidikan berusaha dikembalikan untuk melahirkan insan-insan akademis dan intelektual yang diharapkan dapat membangun bangsa secara demokratis, bukan menghancurkan bangsa dengan budaya-budaya korupsi kolusi dan nepotisme, dimana peran pendidikan (agama, moral dan kenegaraan) yang didapat dari bangku sekolah dengan tidak semestinya. Dalam kondisi yang demikian, mungkin benar ungkapan yang mengatakan “negeri ini dihancurkan oleh kaum intelektualnya sendiri”. Apa sebab, karena pendidikan nasional selama ini bertekuk lutut kepada kepentingan penguasa.

Pendidikan, dalam bahasa lain, mereformasi dirinya sendiri sesuai tuntutan demokratisasi dan terutama perbaikan institusi-institusi pencetak aset-aset masa depan bangsa ini agar tidak seperti pendahulunya. Konsep desentralisasi yang diusung pemerintah dan didukung berbagai elemen demokrasi di negeri ini melahirkan berbagai kebijakan yang memiliki implikasi positif terhadap pendidikan nasional.

Demokratisasi pendidikan terkait dengan beberapa masalah utama, antara lain desentralisasi pendidikan melalui perangkat kebijakan pemerintah yaitu Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan di negara kita.

Namun perlu diketahui bahwa desentralisasi pendidikan ini secara konseptual dibagi menjadi dua jenis.

1. Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan. Desentralisasi lebih kepada kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
2. Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah.

Konsep pertama berkaitan dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah sebagai bagian demokratisasi. Konsep kedua lebih fokus mengenai pemberian kewenangan yang lebih besar kepada manajemen di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam konteks otonomi daerah, kurikulum suatu lembaga pendidikan tidak sekedar daftar mata pelajaran yang dituntut di dalam satu jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengertian yang luas, kurikulum berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran tertentu juga berkenaan dengan proses yang terjadi di dalam lembaga (proses pembelajaran), fasilitas yang tersedia yang menunjang terjadinya proses, dan akhirnya produk atau hasil dari proses tersebut. (Hasbullah 2006:21)

Perubahan kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menekankan kepada kompetensi guru memegang peranan penting terhadap implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), karena gurulah yang pada akhirnya akan melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Guru adalah kurikulum berjalan menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan dalam (Kunandar 2007:40) sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa

didukung oleh mutu guru yang memenuhi syarat maka semuanya akan sia-sia. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tidak cukup dengan pembenahan di bidang kurikulum saja tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan mutu guru di jenjang tingkat dasar dan menengah. Tanpa upaya meningkatkan mutu guru, semangat tersebut tidak akan mencapai harapan yang diinginkan.

Sementara itu landasan berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan berdasarkan pada

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36-38.
- b. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 dan pasal 25 sampai dengan Pasal 27.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Pasal 1 ayat 1 Permen Diknas Nomor 24 tahun 2006)

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan guru yang visioner dan mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran yang sedemikian rupa memberikan nuansa yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik. Apa yang dikenal dengan "*Quantum Learning*" dan "*Quantum Teaching*", pada hakikatnya adalah mengembangkan

suatu model dan strategi pembelajaran yang seefektif mungkin dalam suasana yang menyenangkan dan penuh gairah serta bermakna.

Di masa lalu, suasana lingkungan belajar sering dipersepsikan sebagai suatu lingkungan yang menyiksa, membosankan, kurang merangsang, dan berlangsung secara monoton sehingga anak-anak belajar secara terpaksa dan kurang bergairah. Di lain pihak para guru juga berada dalam suasana lingkungan yang kurang menyenangkan dan seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma (pola pikir) guru dari pola pikir tradisional menuju pola pikir profesional. Apalagi dengan lahirnya undang-undang guru dan dosen menuntut sosok guru yang berkualifikasi, berkompentensi dan bersertifikasi.

Sementara itu menurut Mulyasa dalam (Kunandar 2007:42) sedikitnya ada tujuh kesalahan yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu (1) mengambil jalan pintas dalam pembelajaran; (2) menunggu peserta didik berlaku negatif; (3) menggunakan destructive discipline (disiplin yang bersifat merusak); (4) mengabaikan perbedaan peserta didik; (5) merasa paling pandai dan tahu; (6) tidak adil; dan (7) memaksa hak peserta didik

Beberapa paradigma baru yang harus di perhatikan guru dewasa ini adalah sebagai berikut.

1. Tidak terjebak dalam rutinitas belaka, tetapi selalu mengembangkan dan memberdayakan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya. Guru jangan terjebak pada aktivitas datang,

mengajar, pulang, begitu berulang-ulang sehingga lupa mengembnagkan potensi diri secara maksimal.

2. Guru mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang dapat menggairahkan potensi belajar peserta didik. Guru harus menguasai berbagai macam strategi dan pendekatan serta model pembelajaran sehingga proses belajar-mengajar berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan.
3. Dominasi guru dalam pembelajaran, dikurangi sehigga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berani, mandiri, dan kreatif dalam proses belajar-mengajar.
4. Gruru mampu memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran sehingga peserta didik mendapatkan sumber belajar yang bervariasi.
5. Guru menyukai apa yang diajarkan dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi yang menyenangkan.
6. Guru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muktahir sehingga memiliki wawasan yang luas dan tidak tertinggal dengan informasi terkini.
7. Guru mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat luas dengan selalu menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dan mempunyai integritas yang tinggi.

8. Guru mempunyai visi ke depan dan mampu membaca tantangan zaman sehingga siap menghadapi perubahan dunia yang tidak menentu yang membutuhkan kecakapan dan kesiapan yang baik. (Kunandar 2007:43)

Guru di lapangan melihat siswa sebagai manusia yang mesti diperlakukan secara manusiawi, oleh karena itu kurikulum atau materi yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Menurut penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya ternyata sebagian besar praxis pendidikan di lapangan atau guru dalam melaksanakan kurikulum yang baru ini banyak menemui kendala. Kendala tersebut diantaranya dirubahnya perencanaan pembelajaran (silabus), materi pembelajaran terkadang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi sehingga sebagian besar siswa kurang memahami materi yang telah disampaikan. Hal itu mengakibatkan minat siswa untuk belajar berkurang. Kendala-kendala diatas perlu diselesaikan oleh semua pihak karena otonomi pendidikan sendiri harus disesuaikan dengan keadaan sekolah, kemampuan siswa, sarana dan prasarana dan kemampuan guru sebagai praktisi pendidikan di lapangan. Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil sebuah judul tentang **Persepsi Guru Pkn Terhadap Impelementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Era Otonomi Pendidikan**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan guru PKn terhadap implementasi otonomi pendidikan di sekolah?

Mengingat luasnya permasalahan tersebut, untuk memperjelas dan mempertegas permasalahan yang diteliti, juga untuk menghindari kesempangsiuran penelitian ini, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi guru PKn terhadap implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada masa otonomi pendidikan?
2. Aspek-aspek apa saja yang berubah setelah diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada masa otonomi pendidikan?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala-kendala dengan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam pembelajaran PKn?
4. Upaya apa saja yang dilakukan oleh guru PKn untuk mengatasi kendala-kendala dengan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mencoba menemukan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah penulis rumuskan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi guru PKn terhadap implemntasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada masa otonomi pendidikan.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang berubah setelah diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada masa otonomi pendidikan

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dengan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam pembelajaran PKn.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru PKn untuk mengatasi kendala-kendala dengan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi guru Pkn dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah serta sebagai sarana untuk memberikan sumbangan dan penerapan berupa disiplin ilmu-ilmu yang penulis terima selama mengikuti perkuliahan di jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberitahukan kepada guru PKn bahwa dengan diberlakukannya otonomi dalam bidang pendidikan akan membuat tiap sekolah memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan sistem pendidikannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing dengan tetap diawasi oleh dinas pendidikan setempat.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1995 : 1684) memberikan arahan bahwa persepsi merupakan mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu

2. Guru

Menurut A. Kosasih Djahiri (1992 : 11) yang di maksud dengan pengertian guru secara umum adalah:

Pengertian guru yang umum di kenal adalah orang yang tugas perannya mengajar; berdiri dan menyampaikan pelajaran di hadapan kelas atau sejumlah siswa dengan tugas akhir menentukan penilaian baik naik-tidak atau berhasil-tidaknya penyerapan pelajaran tersebut.

3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Sementara itu pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan/kantor departemen agama kab/kota untuk pendidikan dasar, dan dinas pendidikan/kantor departemen agama untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus (Kunandar 2007:125)

4. Otonomi Pendidikan

Makna otonomi pendidikan adalah pemberian kewenangan yang luas nyata dan bertanggung jawab secara professional untuk mengambil prakarsa dan merumuskan rencana pembangunan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (Hasbullah 2006:38)

F. Metodologi Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung selama penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan guru PKn di lembaga pendidikan yaitu di SMP Negeri 5, SMP Negeri 12 dan SMP negeri 29 sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Mardalis (2003:26) :

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang ada saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Adapun Moleong (2004:10) mengatakan “metode deskriptif akan menghasilkan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data (berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka) untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut”.

Dengan menggunakan metode ini penulis berharap hasil penelitiannya bisa mengungkap rasa keingintahuan yang penulis rasa serta dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca karena tidak terdiri dari angka-angka melainkan berisi informasi deskriptif yang terdiri dari kata-kata serta gambar-gambar yang membantu memperjelas, sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak.

Guba dan Lincoln (Moleong, 2004:175) mengemukakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik yang lain tidak mungkin digunakan,

pengamatan akan menjadi alat yang bermanfaat. Adapun beberapa keuntungan menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut :

- a. Didasarkan pada pengalaman secara langsung.
- b. Memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri.
- c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Menghindari terjadinya keraguan pada peneliti akan kemungkinan adanya data yang bias.
- e. Menghindarkan penulis dari keraguan akan data-data yang didapat.
- f. Memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Davids Wiliams dalam Moleong (2005:5) adalah penelitian dengan pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas bahwa definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, dan dilakukan oleh orang yang memiliki perhatian alamiah. Hal ini sejalan dengan pendapat Lexy J moleong (2005:6) mengatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

G. Lokasi dan Subjek penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya 3 unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat di observasi (Nasution : 1996). Unsur tempat atau lokasi adalah tempat dimana berlangsungnya penelitian tersebut, dalam hal ini SMP Negeri 5, SMP Negeri 12 Dan SMP Negeri 29.

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru PKn di ketiga sekolah tersebut yaitu di SMP Negeri 5, SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 29. Dipilihnya guru ini sebagai objek penelitian karena guru PKn memiliki kemampuan dan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada masa otonomi pendidikan. Selain itu sekolah ini merupakan tempat pengujian terhadap model penelitian yang akan dikembangkan.

H. Instrumen penelitian

1. Lembar panduan observasi

Dalam penelitian ini, lembar observasi dipergunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi guru PKn tentang implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di era otonomi pendidikan.

Observasi menurut Nasution (1996:122) adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan adanya observasi kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial yang sulit diperoleh dengan memakai metode yang lainnya. Observasi akan dilakukan di SMP Negeri 5, SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 29 Bandung

2. Pedoman wawancara

Dalam penelitian ini pedoman wawancara digunakan untuk menjangkau data berkenaan dengan pandangan dan pendapat guru tentang implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada masa otonomi pendidikan di sekolah.

Wawancara menurut Moleong (2002: 183) percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Narasumber yang akan diwawancarai adalah guru PKN di SMP Negeri 5, SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 29 Bandung

3. Studi Literatur

Studi literatur yaitu mempelajari data-data atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh informasi teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian. Peneliti menggunakan berbagai literatur baik berupa buku maupun artikel-artikel dari media masa atau internet yang berkaitan dengan status otonomi daerah sebagai pemberdaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan.

I. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan objektif di lapangan. Yang dimaksud dengan teknik ini adalah bahwa data yang terkumpul akan diolah dan dihubungkan dengan masalah pokok yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan serta dideskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat .

J. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 5, SMP Negeri 12 dan SMP Negeri 29 Kota Bandung

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu sumber yang memberikan informasi, dipilih secara purposif dan bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu (Nasution, 1996:32). Berdasarkan pendapat tersebut maka yang menjadi subjek penelitian adalah Guru PKn.

